

Article

Efektivitas *Peacekeeping* oleh *United Nations-African Union Hybrid Operation Mission In Darfur* (UNAMID) pada Konflik di Sudan Tahun 2007-2010

Hardi Alunaza SD¹ & Bastian Andhony Toy²

¹ Prodi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Tanjungpura Pontianak

² Prodi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Tanjungpura Pontianak

SUBMISSION TRACK

Received : 05 February, 2018

Final Revision : 1 March, 2018

Available Online : 30 May 2018

KEYWORD

Effectiveness, Armed Conflict, Peacekeeping, UNAMID

KATA KUNCI

Efektivitas, Konflik bersenjata, Menjaga Perdamaian, UNAMID

A B S T R A C T

This research aims to explain the effectiveness of peacekeeping implemented by the United Nations and the African Union through UNAMID against the conflict in Sudan. This conflict occurred since 2003, backed by the seizure of power in government and natural resources. The conflict that left thousands of people was killed and millions of people displaced, caused by the movement of Sudan Liberation Movement (SLM) and Justice and Equality Movement (JEM) which assessed the injustice and discrimination committed by Sudan government. Then armed conflict arising between the two rebel groups against the Sudanese Government and the Janjaweed militia. The purpose of this research is to explain how the effectiveness of peacekeeping by UNAMID in resolving the conflict between the Sudanese government and the rebel forces in Darfur in 2007-2010. The author uses the theory of international organizations and concept of peacekeeping in analyzing related phenomena. The method used in this research is the descriptive method with qualitative approach. Data collection technique through library researches in the form of literature, journal, articles, and other reading material related to the problems discussed in this research. This research is divided into two important points in explaining and analyzing the effectiveness of peacekeeping by UNAMID on the conflict in Sudan. First, the role of UNAMID in 2007-2010. Second, the challenge to UNAMID in conflict resolution of Sudan. The results of this research show the role of UNAMID in the reconciliation process of the establishment of a peace agreement between the Sudanese government and JEM in 2010 to halt military aggression on both sides and restore the situation in Sudan.

A B S T R A K

Tulisan ini bertujuan untuk membahas efektivitas *peacekeeping* yang dilaksanakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Uni Afrika melalui UNAMID dalam penyelesaian konflik di Sudan. Konflik ini telah berlangsung sejak tahun 2003, yang dilatarbelakangi oleh perebutan kekuasaan pemerintah dan sumber daya alam. Konflik yang menimbulkan ribuan korban jiwa dan jutaan penduduk mengungsi, diakibatkan munculnya gerakan pemberontakan *Sudan Liberation Movement* (SLM) dan *Justice and Equality Movement* (JEM) yang menilai adanya ketidakadilan maupun diskriminasi yang dilakukan pemerintah Sudan. Kemudian timbul konflik bersenjata antara dua kelompok tersebut melawan Pemerintah Sudan dan milisi *Janjaweed*. Tulisan ini disajikan untuk menjelaskan bagaimana efektivitas *peacekeeping* oleh UNAMID dalam menyelesaikan konflik antara pemerintah Sudan dan pasukan pemberontak di Darfur pada tahun 2007-2010. Penulis menggunakan teori organisasi internasional dan konsep *peacekeeping* dalam menganalisis fenomena terkait. Metode yang digunakan dalam

CORRESPONDENCE

Phone: 082258265825

E-mail: hardialunaza@gmail.com

penulisan ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) berupa literatur, jurnal, artikel, serta bahan bacaan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Tulisan ini terbagi menjadi dua poin penting dalam menjelaskan serta menganalisa efektivitas *peacekeeping* oleh UNAMID pada konflik di Sudan. Pertama, peran UNAMID pada konflik di Sudan tahun 2007-2010. Kedua, tantangan UNAMID dalam penyelesaian konflik di Sudan. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peran UNAMID dalam proses rekonsiliasi melalui terbentuknya perjanjian perdamaian antara pemerintah Sudan dan kelompok pemberontak JEM pada tahun 2010 untuk menghentikan agresi militer kedua belah pihak dan pemulihan keadaan di wilayah Sudan.

Pendahuluan

Konflik merupakan fenomena yang tidak terlepas dalam kehidupan manusia. Menurut Ramsbotham, et al dalam buku *Contemporary Conflict Resolution*, definisi dari konflik adalah sebagai berikut:

“...universal feature of human society. It takes origins in economic differentiation, social change, cultural formation, psychological development and political organization – all of which are inherently conflictual – and becomes overt through the formation of conflict parties, which come to have, or are perceived to have mutually incompatible goals.”¹

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa konflik merupakan hal yang universal dalam kehidupan sosial manusia. Konflik tercipta akibat adanya perbedaan pendapat dan pandangan yang cenderung dilatarbelakangi diferensiasi ekonomi, kondisi sosial, budaya, psikologis dan politik. Perbedaan ini selanjutnya menimbulkan problematika, dimana terjadinya pertikaian akibat kepentingan dan tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing pihak.

Dalam perkembangannya saat ini, perang tidak hanya melibatkan antar negara

melainkan dapat juga melibatkan pihak bukan negara seperti halnya pada konflik bersenjata antara negara dengan pasukan pemberontak dalam suatu negara.² Hal ini menunjukkan bahwa sewaktu-waktu pihak internal suatu negara dapat memicu perang atau konflik, yang mana dapat mengancam stabilitas dan eksistensi dari negara tersebut.

Salah satu konflik bersenjata yang melibatkan pemerintah dan pasukan pemberontak, yaitu terjadi di Darfur, Sudan. Darfur merupakan suatu provinsi yang terletak di Sudan bagian barat dan berbatasan langsung dengan negara Chad dan Republik Afrika Tengah.³ Konflik yang terjadi di Sudan disebabkan marginalisasi (pembatasan hak kepada kelompok tertentu) yang dilakukan pemerintah dan adanya perebutan sumber daya alam terkait air, ladang untuk peternakan maupun pertanian sehingga hal

¹Anak Agung Banyu Perwita et al, *Kajian Konflik dan Perdamaian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, (2015), hlm. 6.

²Gita Arja Pratama, *Peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan African Union (AU) Dalam Menyelesaikan Konflik Bersenjata Non-Internasional di Darfur-Sudan*, Skripsi UNILA, Lampung: Fakultas Hukum UNILA, (2010).
<http://digilib.unila.ac.id/19360>. Diakses pada 03 Januari 2018 pukul 12.53 WIB.

³Dikara Maitri Pradipta Alkarisya, *Internasionalisasi Konflik Etnis Darfur Tahun 2003-2013*, Jurnal Analisis Hubungan Internasional Vol. 3, No. 3, (2014), hlm. 980.
<http://journal.unair.ac.id/downloadfull/JAHI8134-83a73f3a80fullabstract.pdf>. Diakses pada 03 Januari 2018 pukul 13.09 WIB.

tersebut yang kemudian memicu konflik antar etnis.⁴

Darfur dihuni sekitar 30 kelompok etnis dan jumlah populasi mencapai 6 juta orang.⁵ Konflik etnis Darfur terbagi menjadi dua kubu yaitu etnis Arab dan golongan zurga (kulit hitam) yang terdiri dari etnis-etnis telah lama menetap di Sudan. Etnis Arab sendiri merupakan etnis pendatang yang menetap di sebelah utara dan selatan Sudan. Konflik antara etnis Arab dan golongan zurga sudah terjadi sejak tahun 1970 dan semakin memburuk hingga tahun 1980-an.⁶

Kemudian perang antara etnis Arab dan etnis Fur pada tahun 1987-1989 menjadikan konflik etnis Darfur sebagai krisis kemanusiaan terburuk di Afrika.⁷ Konflik kembali terjadi pada tahun 2003, ketika timbulnya gerakan pemberontak *Darfur Liberation Front* (DLF) yang kemudian berubah menjadi *Sudan Liberation Movement* (SLM) dan muncul juga kelompok lainnya yaitu, *Justice and Equality Movement* (JEM). Beberapa etnis dari zurga seperti Fur, Zaghawa, dan Masalit tergabung ke dalam kelompok pemberontakan tersebut.⁸

Tujuan dari kelompok pemberontak ini adalah tuntutan terhadap distribusi keadilan terutama pada akses ekonomi yang mencakup hidup layak dan partisipasi politik yang demokratis. Kelompok ini menilai selama puluhan tahun ras Afrika selalu dikesampingkan dari arena politik dan adanya kebijakan ekonomi dimana ras Arab dianggap lebih diuntungkan.⁹

⁴Deldiya, *Motivasi PBB Membentuk United Nation Mission In Darfur (UNAMID) Sebagai Peacekeeping Operation PBB Pada Konflik Sudan 2007*, Jurnal Online Mahasiswa (JOM) FISIP Universitas Riau Vol. 4, No. 2, (2017), hlm. 2. <https://media.neliti.com/media/publications/190138-ID-motivasi-pbb-membentuk-United-nation-mis.pdf>. Diakses pada 03 Januari 2018 pukul 14.19 WIB.

⁵ *Ibid.*

⁶ Dikara Maitri Pradipta Alkarisya, *Op.Cit.*

⁷ *Ibid.*, hlm. 981.

⁸ *Ibid.*

⁹ Alfira Nasution, *Peran UNAMID Dalam Penyelesaian Konflik Darfur*, Skripsi UMY,

Konflik semakin memanas ketika melibatkan milisi *Janjaweed* (etnis Arab) yang didukung pemerintah Sudan untuk melawan kelompok pemberontakan SLM dan JEM di Darfur. *Janjaweed* disinyalir mendapat bantuan dana, logistik serta perlengkapan senjata dari pemerintah Sudan.¹⁰ Kehadiran milisi *Janjaweed* membuat SLM dan JEM semakin meningkatkan intensitas konflik, mengingat milisi *Janjaweed* terdiri dari etnis Arab yang merupakan etnis pendatang sehingga mengindikasikan etnis tersebut mendukung pemerintahan Sudan. Konflik ini mengakibatkan korban yang tewas berjumlah hingga 300.000 orang, 1,8 juta penduduk mengungsi, dan sekitar 2800 desa hancur.¹¹

Konflik di Sudan baru mendapatkan perhatian masyarakat internasional sekitar awal tahun 2004. Terlambatnya respon internasional dinilai karena pada saat itu perhatian internasional lebih tertuju kepada invasi oleh Amerika Serikat ke Irak. Pada tahun 2004, pihak Uni Afrika membentuk suatu organisasi untuk menangani konflik di Sudan yang disebut *African Union Mission In Sudan* (AMIS), yang berfungsi sebagai penjaga perdamaian dan membantu proses perdamaian antara pihak-pihak yang berselisih dalam konflik Darfur.¹²

Namun adanya keterbatasan kemampuan dari AMIS yang diakibatkan terjadinya serangan pembunuhan terhadap sejumlah personil militer dan kurangnya dana dalam menjalankan operasi perdamaian. Pada 24 Maret 2005, Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 1593 membentuk *United Nation Mission In Sudan* (UNMIS) dengan tujuan membantu AMIS dalam penyelesaian konflik di

Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMY, (2012). <http://thesis.umsu.ac.id/datapublik/t22355.pdf>.

Diakses pada 06 Januari 2018 pukul 19.50 WIB.

¹⁰ Michael Clough, *Darfur: Whose Responsibility to Protect?*, Human Right Watch, (2007), hlm. 3. <https://www.hrw.org/legacy/wr2k5/darfur/darfur.pdf>. Diakses pada 06 Januari 2018 pukul 20.13 WIB.

¹¹ Dikara Maitri Pradipta Alkarisya, *Op.Cit.*

¹² Alfira Nasution, *Op.Cit.*, hlm. 6.

Sudan. UNMIS diberikan mandat dalam membantu pelaksanaan kesepakatan Perjanjian Perdamaian Darfur/*Darfur Peace Agreement* (DPA), mengkoordinasi serta memfasilitasi bantuan kemanusiaan di Darfur.¹³

DPA yang dilaksanakan ternyata tidak begitu efektif karena hanya ditandatangani oleh pemerintah Sudan dan kelompok SLM pimpinan Minni Minawi. Sedangkan JEM serta SLM pimpinan Abdul Wahid menolak menandatangani. SLM memang terpecah secara signifikan ketika diadakan konferensi di desa Haskanita, Darfur timur, yang seharusnya menyatukan gerakan tersebut, akan tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Abdul Wahid, seorang pimpinan pemberontak yang mendapat dukungan dari etnis Fur menolak untuk hadir sehingga Minni Minawi yang mendapat dukungan dari etnis Zaghawa, terpilih sebagai pemimpin SLM. Namun hal tersebut tidak diakui oleh etnis Fur yang kemudian membentuk kelompok SLM dibawah pimpinan Abdul Wahid.¹⁴

Walaupun UNMIS telah membantu AMIS dalam proses menuju perdamaian Darfur. Akan tetapi, pelaksanaan operasi perdamaian sesuai mandat yang telah diberikan tidak berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan keterbatasan aksesibilitas UNMIS oleh pemerintah Sudan akibat belum stabilnya kondisi politik di Sudan. Akan tetapi, pada Juni 2007, pemerintah Sudan akhirnya setuju bergabung dengan penjaga perdamaian PBB dan Uni Afrika dalam penyelesaian konflik di Darfur.

Pada tanggal 31 Juli 2007, DK PBB berdasarkan resolusi 1769 dan persetujuan dari pemerintah Sudan, kemudian membentuk UNAMID dan mengerahkan pasukan yang terdiri dari 26.000 personel

militer dan polisi di wilayah Darfur. Gabungan kekuatan Uni Afrika dan PBB ini diamanatkan untuk mengambil alih misi penjaga perdamaian AMIS, yang telah beroperasi di Darfur sejak tahun 2004. Operasi ini dilengkapi dengan sumber daya yang lebih besar baik dari segi militer maupun logistik untuk melindungi warga sipil dan mengawasi pelaksanaan kesepakatan damai.¹⁵

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan diatas, maka penulis dalam hal ini bertujuan untuk membuat suatu gagasan dan analisa mengenai “Bagaimana efektivitas *peacekeeping* oleh UNAMID pada konflik di Sudan tahun 2007-2010?”.

Tulisan ini terbagi menjadi dua poin penting dalam menjelaskan serta menganalisa efektivitas *peacekeeping* oleh UNAMID pada konflik di Sudan. Pertama, peran UNAMID pada konflik antara pemerintah Sudan dan pasukan pemberontak di Sudan tahun 2007-2010. Kedua, tantangan UNAMID dalam penyelesaian konflik di Sudan.

Kajian Pustaka

Menurut Cheever dan Havilland Jr, organisasi internasional merupakan bentuk kerjasama internasional yang melembaga antara negara. Pada umumnya berlandaskan pada persetujuan dasar dan untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberi manfaat timbal balik melalui pertemuan serta kegiatan organisasi secara berkala.¹⁶ Dengan kata lain, organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai wadah atau kerjasama lintas negara dimana terdapat kebijakan atau aturan yang telah mendapat persetujuan dari negara-negara anggota terkait kegiatan dan tujuan yang ingin dicapai.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ M. Radhina Rahman, *Peran PBB Dalam Menanggulangi Permasalahan HAM Terkait Konflik Bersenjata LRA (LORD'S RESISTANCE ARMY) di Uganda*, Jurnal Online Mahasiswa Fisip Vol. 1, No. 2, (2014). <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/3119/3020>. Diakses pada 09 Januari 2018 pukul 11.28 WIB.

¹³ Human Right Watch, *Darfur 2007: Chaos Design Peacekeeping Challenges AMIS and UNAMID*, (2007).

<https://www.hrw.org/report/2007/09/19/darfur-2007-chaos-design-peacekeeping-challenges-amis-and-unamid#page>. Diakses pada 06 Januari 2018 pukul 20.46 WIB.

¹⁴ *Ibid.*

Klasifikasi organisasi internasional terbagi dalam beberapa tipe seperti dikemukakan oleh Noyes E. Leech yang mengklasifikasikan tiga tipe utama dari

organisasi internasional. *Pertama*, perwakilan administratif yang dibentuk terkait tugas teknik khusus seperti aturan-aturan mengenai komunikasi internasional. *Kedua*, keperluan atau perlengkapan dalam membuat keputusan pengadilan atau konsiliasi dari suatu perselisihan internasional. *Ketiga*, hukum organisasi internasional umum ditetapkan dalam setiap dasar organisasi internasional untuk menciptakan perlindungan secara kolektif dan mempromosikan tindakan kooperatif dari permasalahan yang bersifat internasional.¹⁷

Organisasi internasional sebagai forum kerja sama internasional yang memiliki peranan yang diharapkan terkait pelaksanaan kegiatan organisasi tersebut. Adapun peran organisasi internasional adalah antara lain: *Pertama*, sebagai forum atau wadah dalam membentuk kerjasama serta mencegah dan mengurangi intensitas konflik. *Kedua*, sebagai sarana perundingan (rekonsiliasi) dan menghasilkan keputusan kolektif yang saling menguntungkan. *Ketiga*, Lembaga yang mandiri terkait pelaksanaan kegiatan yang dibutuhkan seperti bantuan kemanusiaan, kegiatan sosial, pelestarian lingkungan hidup, *peacekeeping operation* dan sebagainya.¹⁸

¹⁷Noyes E. Leech et al, *The International Legal System, Cases and Materials*, New York: Foundation Press, (1973), Hlm. 872. Dilihat dalam Dita Herdiyanti, *Peranan UNOCI (United Nations Operation In Cote D'Ivoire) Dalam Penyelesaian Konflik Pasca Pemilu 2010 Di Pantai Gading*, Skripsi UNHAS, Makassar: Universitas Hasanuddin, (2013). <https://core.ac.uk/download/pdf/25489411.pdf>. Diakses pada 09 Januari 2018 pukul 11.06 WIB.

¹⁸Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Bandung: Remaja Rosdakarya, (2005). Dilihat dalam Rendi Hardi, *BAB II Tinjauan Pustaka*, Bandung: Universitas Komputer Indonesia.

PBB sebagai organisasi internasional didunia tentu memiliki peranan yang besar dalam memfasilitasi terkait hukum internasional, pengembangan ekonomi, keamanan internasional, HAM, perlindungan sosial, dan perdamaian dunia.¹⁹ Keberadaan PBB sebagai forum internasional diharapkan mampu menyelesaikan konflik-konflik seperti yang tertulis dalam Pasal 1 Piagam PBB, yaitu mengenai perdamaian dan keamanan internasional yang bertujuan mencegah ataupun menyelesaikan perselisihan yang dapat mengancam stabilitas dan perdamaian dunia.²⁰

Pada dasarnya istilah *peacekeeping* tidak muncul dibagian manapun dalam Piagam PBB. Akan tetapi, dalam dokumen PBB, Boutros-Ghali mengatakan bahwa *peacekeeping* adalah:

*“the deployment of a United Nations presence in the field, hitherto with the consent of all the parties concerned, normally involving United Nations military and/or police personnel and frequently civilians as well. Peacekeeping is a technique that expands the possibilities for both prevention of conflict and the making of peace.”*²¹

Dari definisi diatas dapat diartikan bahwa *peacekeeping* merupakan tindakan atau langkah berkaitan dengan penjagaan perdamaian yang dilakukan oleh PBB, yang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan dari negara-negara anggota. Dalam hal ini, PBB menempatkan sejumlah pasukan militer, polisi dan sipil dalam wilayah konflik untuk memungkinkan dalam pencegahan suatu konflik dan terciptanya rekonsiliasi antara pihak yang berkonflik.

<http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/455/jbptunikomp-gdl-rendihardi-22710-8-i-bab-i.pdf>. Diakses pada 09 Januari 2018 pukul 10.34 WIB.

¹⁹M. Radhina Rahman, *Op.Cit*.

²⁰United Nations, *Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice*, (1945). <https://treaties.un.org/doc/publication/ctc/uncharter.pdf>. Diakses pada 09 Januari 2018 pukul 12.31 WIB.

²¹ Anak Agung Banyu Perwita, *Op.Cit*, hlm. 81.

Sedangkan menurut *Pearson Peacekeeping Centre*, definisi dari *peacekeeping* adalah:

*“peacekeeping consists of actions designed to enhance international peace, security, and stability which are authorized by competent national and international organizations and which are undertaken cooperatively and individually by military, humanitarian, good governance, civilian police and other interested agencies and groups.”*²²

Menurut definisi diatas, *peacekeeping* merupakan aksi yang terintegrasi dalam upaya menjaga perdamaian, keamanan dan stabilitas yang dilaksanakan oleh organisasi nasional dan internasional yang kompeten, serta dilakukan secara kooperatif baik dari aspek militer, kemanusiaan, pemerintahan yang baik, polisi sipil dan kelompok lain yang memiliki tujuan serupa.

Dari sejumlah definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa *peacekeeping* merupakan teknik perwujudan dan pemeliharaan perdamaian yang dilaksanakan oleh organisasi internasional dan nasional yang kompeten terdiri penjaga perdamaian yang kooperatif, terlatih dalam bidang militer, kemanusiaan, pemerintahan yang baik, polisi sipil dan agen dan kelompok lain yang berkepentingan. Tindakan *peacekeeping* dilaksanakan untuk menjaga integritas, stabilitas, serta keamanan agar pihak-pihak yang bertikai dapat menghentikan agresi militer dan sebagai langkah awal dalam mewujudkan proses perundingan perdamaian.

Konsep *peacekeeping* akan digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisa sejauh mana efektivitas dari peran PBB sebagai organisasi internasional yang memiliki tujuan dan komitmen terhadap penyelesaian konflik yang relevan dalam upaya untuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia.

²² *Ibid.*

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana penulis memaparkan gambaran mengenai situasi fenomena sosial, memilah informasi dalam objek yang relevan dengan suatu permasalahan baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis.²³ Kemudian dilanjutkan dengan interpretasi data sehingga dapat menjelaskan dan menganalisa permasalahan serta memberikan jawaban terhadap bagaimana efektivitas *peacekeeping* oleh UNAMID terkait menjalankan kewajiban dan misinya pada konflik di Darfur tahun 2007-2010.

Teknik analisis data merupakan proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah penulis dalam memperoleh kesimpulan. Menurut Miles & Huberman, analisis terbagi menjadi tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, antara lain: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi).²⁴ Penulis akan menggunakan analisis data kualitatif yang bersifat induktif, yaitu analisis melalui data yang telah diperoleh.

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan (*library research*).²⁵ Teknik ini memungkinkan penulis untuk mencari dan menelusuri informasi, seperti literatur, jurnal penelitian, buku, dokumen dari

²³ Deldiya, *Op.Cit.*

²⁴ M.B. Milles dan A.M. Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, (1992), hlm. 16. Dilihat dalam Aji Pradita, *BAB III Metodologi Penelitian*, Skripsi UNY, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, (2013). <http://eprints.uny.ac.id/>

18100/5. Diakses pada 07 Januari 2018 pukul 09.33 WIB.

²⁵ W.L. Neuman, *Social Research Method*, Boston: Allyn & Bacon, (2000). Hlm. 448-454. Dilihat dalam Rosa Longi Folia, *Perubahan Kebijakan Luar Negeri Non Intervensi Cina Terhadap Konflik Sudan*, Skripsi UNAIR, Surabaya: Universitas Airlangga, (2012). <http://repository.unair.ac.id/15453/1/gdlhub-gdl-s1-2012-foliarosal-20778-fis.hi.3-p.pdf>. Diakses pada 07 Januari 2018 pukul 09.05 WIB.

website, dan bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Pembahasan

Peran UNAMID Pada Konflik di Sudan Tahun 2007-2010

Pembentukan UNAMID pada tahun 2007 merupakan operasi gabungan (*hybrid operation*) antara PBB dan Uni Afrika, dimana sebelumnya telah menjalankan operasi melalui AMIS dan UNMIS dalam menjaga perdamaian dan keamanan di wilayah Sudan. Pasukan UNAMID terbentuk dari sejumlah pasukan yang berasal dari negara-negara anggota PBB. Adapun rincian personel dari pasukan UNAMID, antara lain: 19.555 personel militer, 360 pengamat militer, 3.772 personel polisi, dan 19 unit polisi yang terdiri dari 140 personel di setiap unitnya.²⁶

Berdasarkan Resolusi DK PBB Nomor 1769 Tahun 2007, menetapkan bahwa UNAMID diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang diperlukan terkait pengerahan pasukan dan dianggap sesuai kemampuannya untuk:²⁷

Pertama, melindungi personel, peralatan, fasilitas dan instalasi serta menjamin akses dan keamanan dari personel yang dimilikinya dan pekerja kemanusiaan;

Kedua, mendukung pelaksanaan awal dan efektif dari Perjanjian Damai Darfur (*DPA/Darfur Peace Agreement*), mencegah gangguan terhadap perjanjian tersebut seperti serangan bersenjata dan melindungi warga sipil tanpa mengurangi tanggung jawab Pemerintah Sudan.

Dewan PBB kemudian menetapkan mandat UNAMID sebagaimana diatur dalam paragraf 54 dan 55 dari laporan Sekretaris Jenderal PBB dan Ketua Komisi Uni Afrika pada 5 Juni 2007, yaitu berkontribusi terhadap pemulihan

keamanan dalam menyediakan bantuan dan akses kemanusiaan; memberikan perlindungan terhadap warga sipil; mengawasi pelaksanaan perjanjian gencatan senjata antara pihak-pihak yang bertikai; membantu dalam proses politik yang inklusif, dan mendukung upaya mediasi untuk memperluas dan melaksanakan komitmen terkait proses perdamaian; berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan dan rekonstruksi infrastruktur, serta mendampingi kembalinya pengungsi; membantu mempromosikan dan menghormati perlindungan terhadap HAM; mempromosikan dan mengawasi supremasi hukum di Darfur; memonitor dan melaporkan situasi keamanan di wilayah perbatasan Sudan dengan negara Chad dan Republik Afrika Tengah.²⁸

Dalam implementasinya, mandat dan kewajiban yang dilaksanakan oleh UNAMID dalam menjaga perdamaian dan penghentian konflik lanjutan antara Pemerintah Sudan dan pasukan pemberontak, antara lain:

Pertama, terkait pemulihan kondisi keamanan yang diperlukan untuk menyediakan bantuan dan akses kemanusiaan. UNAMID membentuk *Humanitarian Recovery Development and Liaison Section* (HRDLS), sebagai suatu organisasi yang bertanggungjawab atas bantuan kemanusiaan. HRDLS menyediakan tenda penampungan untuk masyarakat yang mengungsi akibat konflik di Darfur serta menyediakan bantuan pangan, air serta bantuan medis.²⁹

Pada tahun 2009, ketika terjadi penyerangan oleh milisi *Janjaweed*

²⁶United Nations Security Council, *Resolution 1769*, (2007). [http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1769\(2007\)](http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1769(2007)). Diakses pada 07 Januari 2018 pukul 12.55 WIB.

²⁷ *Ibid*.

²⁸ Gita Arja Pratama, *Op.Cit*.

²⁹ Adeyinka Samson Adeniji, Agaba Halidu, & Jacob Nda James, *The United Nations/African Union Intervention in the Darfur Conflict (2007-2010): Achievements, Challenges, and Lessons For Future*, Global Journal of Arts, Humanities and Social Sciences Vol.3, No.8, (2015), hlm. 72. <http://www.eajournals.org/wp-content/uploads/The-United-Nations-African-Union-Intervention-in-the-Darfur-Conflict-2007-2010.pdf>. Diakses pada 07 Januari 2018 pukul 18.19 WIB.

terhadap warga sipil di kota Labado, UNAMID menyediakan tenda yang menampung sekitar 50.000 penduduk. Pada tahun 2010, UNAMID bekerjasama dengan UNICEF (*United Nation Children Education Fund*) dan WHO (*World Health Organization*) dalam pendistribusian obat-obatan dan bantuan nutrisi sebesar 14 ton. Pada Desember 2010, di kota Khor Abeche, lebih dari 10.000 orang pengungsi berada di kamp yang didirikan oleh UNAMID dan mendapat distribusi bantuan pangan mencapai 19 ton.³⁰

Kedua, perlindungan keamanan terhadap penduduk sipil. UNAMID tidak hanya melakukan patroli keamanan, tetapi juga memberikan pelatihan publik terkait pengelolaan kejahatan kepada 2.414 masyarakat Sudan di kamp UNAMID untuk menjadi relawan dan agen operasi keamanan. Relawan tersebut diharapkan dapat membantu keamanan berupa patroli di sekitar kamp dan desa, serta melakukan penangkapan terhadap pelaku kejahatan dan menyerahkannya kepada polisi Sudan.³¹

Pada tanggal 18 dan 19 Oktober 2008 di wilayah Darfur Utara, pasukan UNAMID dan perwakilan militer Sudan melakukan penyisiran terkait pengamanan wilayah terhadap ranjau maupun bom yang belum aktif agar tidak membahayakan warga sipil.³²

Ketiga, mempromosikan dan menegakkan HAM dan supremasi hukum di Darfur. Dalam mempromosikan HAM, UNAMID memberikan sesi pelatihan untuk polisi dan personil militer Sudan terkait berbagai isu, seperti pelatihan bagaimana menghadapi dan menangani tindakan anarkis, kekerasan seksual,

diskriminasi gender dan HAM, serta metode investigasi kriminal.³³

UNAMID juga terlibat dalam peradilan Sudan di tingkat lokal. UNAMID mengawasi persidangan di pengadilan dan memberikan dukungan teknis untuk pembentukan unit hukum Kementerian Keadilan di Darfur Utara. UNAMID juga membangun perpustakaan hukum dan dihibahkan kepada lembaga peradilan Darfur Utara sebagai bagian dari mandatnya untuk mendukung dan memperkuat negara dan lembaga-lembaga hukum masyarakat sipil di Darfur.³⁴

Keempat, membantu proses politik yang inklusif, dan untuk mendukung mediasi dalam upaya untuk memperluas dan memperdalam komitmen proses perdamaian. UNAMID menyelenggarakan lebih dari 40 lokakarya (seminar) berkaitan dengan pembagian kekuasaan, penyebab konflik di Darfur dan rencana untuk pengembalian pengungsi. UNAMID kemudian merancang proposal untuk meningkatkan pemahaman dan mendapat dukungan masyarakat terkait proses perdamaian. UNAMID juga bertemu sembilan partai politik di Darfur untuk melakukan dialog politik.

Pada tahun 2009, UNAMID melalui *Civil Affairs Division* (CAD) mengundang pemerintah Sudan, perwakilan dari *Darfur Peace and Reconciliation Commission* (DPRC) dan sebagainya untuk mengadakan dialog budaya yang bertujuan membahas perbedaan suku di masyarakat agar tidak terjadinya perpecahan etnis serta meningkatkan perhatian terkait fasilitas sosial di Sudan.³⁵

Kelima, membantu mediasi antara Pemerintah Sudan dan kelompok pemberontak. Pada tanggal 23 Februari 2010, ditandatangani perjanjian damai antara Pemerintah Sudan dengan kelompok pemberontak JEM. Perjanjian kemudian ditandatangani di Doha, Qatar oleh

³⁰ *Ibid*, hlm. 73.

³¹ *Ibid*.

³² UNAMID, *UNAMID and Mine Action Team Detonate Unexploded Ordinance*, (2008). <https://unamid.unmissions.org/unamid-and-mine-action-team-detonate-unexploded-ordinance>. Diakses pada 08 Januari 2018 pukul 12.54 WIB.

³³ Adeyinka Samson Adeniji, Agaba Halidu, & Jacob Nda James, *Op.Cit*.

³⁴ *Ibid*, hlm. 74.

³⁵ *Ibid*.

Presiden Sudan Omar El-Bashir dan Khalil Ibrahim sebagai pimpinan JEM.³⁶ Pelaksanaan perjanjian tersebut juga dihadiri pemimpin negara Chad, Ethiopia, Burkina Faso, Eritrea dan Qatar. Perjanjian ini dapat terlaksana setelah perundingan yang disponsori oleh Uni Afrika, PBB dan Liga Arab.³⁷

Keenam, memonitor dan melaporkan situasi keamanan di Sudan. UNAMID melakukan patroli mencapai lebih dari 200 patroli dilakukan setiap hari di seluruh Darfur. Pada tahun 2010, berdasarkan pemantauan UNSC (*United Nations Security Criminal*), UNAMID telah melakukan 3411 patroli rutin, 637 patroli jarak dekat, 324 patroli jarak jauh, 1001 patroli malam, 524 *firewood patrols*, 184 patroli pendamping kemanusiaan dan 691 patroli

logistik/administratif di sekitar kamp pengungsi kota Darfur dan desa-desa di Darfur.³⁸

Tantangan UNAMID Dalam Penyelesaian Konflik Di Sudan

Dalam pelaksanaan operasi perdamaian, UNAMID mengalami sejumlah tantangan dan hambatan terkait misi dan mandat yang telah diberikan terhadap konflik di Darfur pada tahun 2007-2010, antara lain:

Pertama, kurangnya dukungan penuh dari pemerintah Sudan. Meskipun pemerintah Sudan sudah memberikan persetujuan kehadiran UNAMID, akan tetapi terjadi beberapa insiden yang dialami UNAMID mengindikasikan belum penuhnya dukungan yang diberikan.

Adanya hambatan yang dilakukan oleh pemerintah Sudan disinyalir terkait konstelasi politik yang terjadi di Sudan.

Pemerintah Sudan mencurigai UNAMID sebagai pihak yang ingin menggulingkan kekuasaan pemerintahan di Sudan. Hal ini dipertegas oleh Rodolphe Adada selaku pimpinan UNAMID mengatakan pemerintah Sudan melihat UNAMID sebagai kekuatan yang tujuannya adalah untuk menggulingkan rezim tersebut, namun dengan kehadiran Uni Afrika memungkinkan untuk meringankan kecurigaan ini.³⁹

Pada 2009, terdapat 42 insiden penolakan terhadap pasukan UNAMID oleh pejabat pemerintah di beberapa kawasan Sudan, termasuk adanya ancaman yang dilakukan pejabat terhadap staf dan pasukan UNAMID. Patroli pasukan UNAMID patroli juga pernah mendapat tembakan peringatan dan adanya helikopter militer pemerintah Sudan SAF (*Sudan Army Force*) yang terbang rendah mendekati konvoi UNAMID serta memberikan peringatan.⁴⁰ Pada Oktober 2009, terjadi penundaan persetujuan terhadap 56 visa pasukan UNAMID. Namun, upaya mendapat visa untuk personel UNAMID tetap berhasil, akan tetapi beberapa permintaan yang tersisa menunggu selama hampir 10 bulan.⁴¹

Duta Besar Sudan untuk PBB, Abdahlhalim membantah persepsi bahwa pemerintah Sudan menghambat proses perizinan pasukan negara-negara non-Afrika untuk bergabung dengan misi perdamaian UNAMID. Abdahlhalim menilai pihak PBB tidak mempertimbangkan pasukan dari Afrika

³⁶ DW (*Deutsche Welle*), *Gencatan Senjata di Darfur*, (2010). <http://www.dw.com/id/gencatan-senjata-di-darfur/a-5281293>. Diakses pada 08 Januari 2018 pukul 16.06 WIB.

³⁷Egidius Patmistik, *Sudan dan Pemberontak Darfur Berdamai*, (2011). <http://nasional.kompas.com/read/2011/07/15/10541242/sudan.dan.pemberontak.darfur.berdamai>. Diakses pada 08 Januari 2018 pukul 16.45 WIB.

³⁸Adeyinka Samson Adeniji, Agaba Halidu, & Jacob Nda James, *Op.Cit.*

³⁹B. Louwrens Prinsloo, *Chapter 6: The African Union-United Nations Mission In Darfur (UNAMID)*, Thesis, Potchefstroom: North-West University, (2012). http://dspace.nwu.ac.za/bitstream/handle/10394/11076/Prinsloo_BL_Chapter_6.pdf?sequence=7. Diakses pada 09 Januari 2018 pukul 16.28 WIB.

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹*Ibid.*

yang dianggap lebih sesuai untuk menjalankan misi di Darfur.⁴²

Duta Besar AS untuk PBB, Susan Rice menyatakan tidak bisa menerima kebijakan pemerintah Sudan untuk membatasi aksesibilitas maupun operasionalisasi UNAMID terkait misinya, termasuk melindungi penduduk sipil dan evakuasi pasukan perdamaian UNAMID yang diserang. Pemerintah Sudan diharapkan memberikan kebebasan penuh akses dan pergerakan kepada UNAMID dan para pekerja kemanusiaan.⁴³

Kedua, serangan fisik yang dilakukan kepada pasukan UNAMID. Sejak tahun 2007, UNAMID menyatakan bahwa sejumlah 33 tentaranya tewas dalam melaksanakan tugas terkait konflik antara pemerintah dan pemberontak di Sudan.⁴⁴ Pada 2008, tujuh anggota UNAMID asal Tanzania tewas diserang kelompok bersenjata ketika melakukan patroli di Khar Abeche, Darfur Selatan.⁴⁵

Pada tahun 2009, terjadi penyerangan dari kelompok bersenjata terhadap UNAMID ketika melaksanakan patroli di El Geneina, Darfur Barat. Penyerangan tersebut mengakibatkan empat personel UNAMID mengalami luka tembak.⁴⁶ Pada

bulan Mei 2010, konvoi pasukan UNAMID diserang oleh kelompok bersenjata yang menewaskan dua pasukan UNAMID asal Mesir.⁴⁷ Sekjen PBB, Ban Ki-moon mengutuk aksi serangan terhadap pasukan UNAMID dan meminta pemerintah Sudan melakukan penyelidikan terhadap penyerangan tersebut. Adanya sejumlah serangan fisik dari kelompok bersenjata tentu menghambat peran dan kewajiban UNAMID dalam mengupayakan perdamaian di Darfur.⁴⁸

Analisis Efektivitas Peacekeeping UNAMID pada Konflik di Sudan 2007-2010

Dalam menentukan efektivitas *peacekeeping* dari PBB, penulis dalam hal ini menilai melalui implementasi resolusi DK PBB dan mandat yang diberikan kepada pasukan perdamaian PBB dalam upaya menghentikan agresi militer dan pemulihan keamanan di wilayah yang sedang berkonflik.

Pada dasarnya konflik antara pemerintah dan gerakan pemberontak yang terjadi di Sudan, tidak terlepas dari situasi politik yang di Sudan. Adanya marginalisasi dan diskriminasi politik oleh pemerintah Sudan serta konflik antar etnis karena perebutan sumber daya alam semakin memperparah konflik yang terjadi di Sudan.

PBB dan Uni Afrika sebagai organisasi internasional memiliki suatu tujuan serta tanggung jawab terkait keamanan dan perdamaian terkait konflik di Sudan, terlebih lagi konflik ini telah mengakibatkan timbulnya korban jiwa mencapai ratusan ribu dan jutaan penduduk mengungsi. Kemudian PBB dan Uni

⁴²DW (*Deutsche Welle*), *Korban Tewas Konflik Darfur Bisa Mencapai 300.000 Orang*, (2008). <http://www.dw.com/id/korban-tewas-konflik-darfur-bisa-mencapai-300000-orang/a-3287551>. Diakses pada 09 Januari 2018 pukul 16.40 WIB.

⁴³Egidius Patnistik, *Kondisi Korban Penculikan Memprihatinkan*, (2010). <http://internasional.kompas.com/read/2010/07/28/10483151/Kondisi.Korban.Penculikan.Memprihatinkan>. Diakses pada 09 Januari 2018 pukul 13.23 WIB.

⁴⁴BBC, *Darfur peacekeepers killed in Sudan attack*, (2011). <http://www.bbc.com/news/world-africa-15263914>. Diakses pada 07 Januari 2018 pukul 15.37 WIB.

⁴⁵BBC, *Tujuh tentara PBB tewas di Sudan*, (2013). http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/07/130714_pbb_darfur_tewas. Diakses pada 08 Januari 2018 pukul 12.58 WIB.

⁴⁶UNAMID, *UNAMID Condemns Attack on One of Its Patrols*, (2009). <https://unamid.unmissions.org/unamid-condemns-attack-one-of-its-patrols>. Diakses pada 08 Januari 2018 pukul 14.33 WIB.

⁴⁷Kunto Wibisono, *2 Prajurit Mesir Tewas Dalam Serangan di Darfur*, (2010). <https://www.antaranews.com/berita/185968/2-prajurit-mesir-tewas-dalam-serangan-di-darfur>. Diakses pada 08 Januari 2018 pukul 14.55 WIB.

⁴⁸CNN, *U.N.: Darfur Attack Kills 7 Peacekeepers*, (2008). <http://edition.cnn.com/2008/WORLD/africa/07/09/darfur.peacekeepers/index.html>. Diakses pada 08 Januari 2018 pukul 15.32 WIB.

Afrika membentuk UNAMID, untuk menggantikan peran dari AMIS dan UNMIS sebelumnya yang dinilai memiliki keterbatasan dalam pelaksanaan mandat dan adanya ketidakpercayaan dari pemerintah Sudan terhadap UNMIS. Oleh karena itu, adanya penggabungan ini dilatarbelakangi karena AMIS dari Uni Afrika sebagai pihak sebelumnya dipercaya oleh pemerintah Sudan, sementara UNMIS dari pihak PBB tentu memiliki pasukan dan akomodasi yang lebih besar daripada AMIS. Hal ini menunjukkan adanya sinergi antara PBB dan Uni Afrika dalam bekerja sama dalam penyelesaian konflik melalui penyatuan pasukan perdamaian dalam upaya memberikan efektivitas *peacekeeping* di Sudan

UNAMID sebagai utusan DK PBB, memiliki mandat dan peranan dalam upaya menjaga perdamaian dan keamanan di Sudan. UNAMID berkontribusi terhadap akses dan bantuan untuk kemanusiaan di Darfur terkait pengiriman bantuan pangan, medis, dan persediaan air. UNAMID juga membangun tenda-tenda pengungsian untuk menampung penduduk sipil yang mengungsi.

Dalam hal perlindungan terhadap warga sipil, UNAMID tidak hanya melakukan patroli semata, tetapi turut memberikan suatu pelatihan terhadap warga sipil dengan tujuan untuk membantu keamanan publik, patroli di sekitar tenda pengungsian, serta menyerahkan pelaku kejahatan kepada polisi Sudan. Hal ini menunjukkan adanya inisiatif UNAMID dalam memberikan edukasi kepada

penduduk Sudan agar dapat berpartisipasi terhadap keamanan di wilayahnya.

UNAMID kemudian turut memberikan pelatihan terkait penegakan HAM dan supremasi hukum di Sudan. Adanya pelatihan mengenai kepada polisi dan militer Sudan menunjukkan UNAMID tidak hanya terfokus kepada warga sipil tetapi juga memberikan edukasi kepada pihak aparat pemerintah Sudan. Dalam upaya penegakan hukum di Sudan,

UNAMID juga turut memantau peradilan lokal di Sudan dan membangun perpustakaan hukum dengan tujuan memberikan ilmu pengetahuan mengenai hukum serta implementasinya dapat berjalan dengan baik di Sudan.

UNAMID juga berperan dalam terlaksananya dialog politik dengan warga sipil maupun partai politik. Hal ini dilakukan agar UNAMID dapat memahami konstelasi politik di Sudan dan melalui dialog tersebut UNAMID juga melakukan pendekatan kepada pihak terkait untuk berdiskusi terkait penyelesaian konflik di Sudan.

Berkaitan dengan peran-peran yang telah dijelaskan diatas, tentu menunjukkan adanya upaya dari UNAMID sebagai organisasi internasional untuk membantu penyelesaian konflik di Sudan, sesuai dengan tujuan dan mandat yang diberikan oleh DK PBB. Hal ini telah sesuai dengan teori organisasi internasional dimana organisasi tersebut memiliki tujuan bersama, dalam hal ini terkait dengan menjaga perdamaian. Kerja sama PBB dan Uni Afrika dalam membentuk UNAMID, tentu dilandasi tujuan dan tanggung jawab yang disepakati terutama dalam menyelesaikan konflik di wilayah Sudan.

Meskipun UNAMID memiliki mandat dari DK PBB dan mendapat persetujuan dari pemerintah Sudan. Namun, terdapat sejumlah tantangan yang dialami UNAMID. Dalam hal ini, pemerintah Sudan dinilai belum mendukung penuh keberadaan UNAMID, dikarenakan timbulnya kecurigaan pemerintah Sudan kepada UNAMID terkait kemungkinan untuk menggulingkan rezim pemerintah di Sudan. Hal ini juga ditunjukkan terjadinya sejumlah insiden dimana UNAMID terkesan mendapat diskriminasi oleh pejabat maupun pihak militer Sudan. Keadaan politik yang belum stabil, mengindikasikan pemerintah Sudan tidak ingin adanya intervensi politik yang berlebihan dari UNAMID.

Adanya serangan fisik dari kelompok bersenjata terhadap UNAMID, tentu juga

menjadi hambatan dalam upaya menjaga keamanan. Penyerangan tiba-tiba terhadap konvoi patroli pasukan UNAMID dapat membahayakan operasi yang dilaksanakan. Hal ini tentu berdampak pada kurang optimalnya operasi UNAMID, terlebih lagi kelompok bersenjata tersebut tentu lebih memahami kondisi geografis di Sudan sehingga berpotensi mengancam keselamatan pasukan dan staf UNAMID.

Terlepas dari tantangan yang dialami, upaya perdamaian yang dilaksanakan UNAMID setidaknya cukup efektif melalui penempatan pasukan dalam melakukan patroli untuk memberikan keamanan dan perlindungan terhadap warga sipil. Namun, efektivitas dari UNAMID belum terpenuhi secara menyeluruh dan belum berimplikasi langsung terhadap perdamaian di Sudan, dimana kelompok pemberontak lainnya belum memulai penjanjian damai serupa. Namun, hal ini dapat menjadi harapan dan awal dalam perwujudan perdamaian dan keamanan yang menyeluruh di wilayah Sudan.

Kesimpulan

Konflik bersenjata antara pemerintah Sudan dan kelompok pemberontak menjadi konflik yang kompleks, dimana selain adanya pengaruh politik, ekonomi, dan keadilan terdapat faktor lainnya seperti pertentangan antar etnis sehingga mengakibatkan korban jiwa mencapai ratusan ribu orang dan jutaan penduduk kehilangan tempat tinggal serta ribuan desa hancur oleh peperangan ini.

UNAMID sebagai utusan PBB terhadap penyelesaian konflik di Darfur

menunjukkan efektivitas *peacekeeping* berdasarkan mandat yang telah diberikan melalui pelaksanaan kewajiban seperti pengiriman bantuan kemanusiaan,

perlindungan terhadap warga sipil, adanya pelatihan kepada warga sipil dan polisi serta pihak militer Sudan, maupun berperan dalam pelaksanaan rekonsiliasi antara pemerintah Sudan dan kelompok pemberontak JEM. Namun, adanya sejumlah tantangan dan hambatan terhadap UNAMID, seperti kurangnya dukungan dari pemerintah Sudan dan serangan fisik terhadap staf dan personil tentu membuat kurang optimalnya operasi terkait perdamaian dan keamanan oleh UNAMID.

Pemerintah Sudan diharapkan mampu memberikan dukungan penuh dan memperkuat kerjasama dengan UNAMID dalam penyelesaian konflik di Sudan agar mengurangi kesalahpahaman antara UNAMID dan pemerintah Sudan. Akan tetapi, UNAMID tetap mendapatkan pujian dan apresiasi karena dapat menunjukkan komitmen dan tugasnya terkait pelaksanaan *peacekeeping* sesuai mandat Dewan Keamanan PBB. Tulisan ini hanya ingin menilai sejauh mana efektivitas *peacekeeping* oleh UNAMID pada konflik di Sudan tahun 2007-2010, dimana walaupun belum efektif secara menyeluruh terhadap perdamaian di Sudan. Akan tetapi, melalui penandatanganan perjanjian antara pemerintah dan salah satu kelompok pemberontak dapat menjadi awal perwujudan perdamaian di Sudan.

Daftar Pustaka

- Adeniji, Adeyinka Samson, Halidu, Agaba & James, Jacob Nda. *The United Nations/African Union Intervention in the Darfur Conflict (2007-2010): Achievements, Challenges, and Lessons For Future*. Global Journal of Arts, Humanities and Social Sciences Vol. 3, No. 8, (2015). <http://www.eajournals.org/wp-content/uploads/The-United-Nations-African-Union-Intervention-in-the-Darfur-Conflict-2007-2010.pdf>. Diakses pada 07 Januari 2018 pukul 18.19 WIB.
- Alkarisya, Dikara Maitri Pradipta. *Internasionalisasi Konflik Etnis Darfur Tahun 2003-2013*. Jurnal Analisis Hubungan Internasional Vol. 3, No. 3, (2014). http://journal.unair.ac.id/downloadfull/JAHI8134-83a73f3a_80fullabstract.pdf. Diakses pada 03 Januari 2018 pukul 13.09 WIB.
- BBC. *Darfur peacekeepers killed in Sudan attack*. (2011). <http://www.bbc.com/news/world-africa-15263914>. Diakses pada 07 Januari 2018 pukul 15.37 WIB.
- BBC. *Tujuh tentara PBB tewas di Sudan*. (2013). http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/07/130714_pbb_darfur_tewas. Diakses pada 08 Januari 2018 pukul 12.58 WIB.
- Clough, Michael. *Darfur: Whose Responsibility to Protect?*. Human Right Watch, (2007). <https://www.hrw.org/legacy/wr2k5/darfur/darfur.pdf>. Diakses pada 06 Januari 2018 pukul 20.13 WIB.
- CNN. *U.N.: Darfur Attack Kills 7 Peacekeepers*. (2008). <http://edition.cnn.com/2008/WORLD/africa/07/09/darfur.peacekeepers/index.html>. Diakses pada 08 Januari 2018 pukul 15.32 WIB.
- Deldiya. *Motivasi PBB Membentuk United Nation Mission In Darfur (UNAMID) Sebagai Peacekeeping Operation PBB Pada Konflik Sudan 2007*. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) FISIP Universitas Riau Vol. 4, No. 2, (2017). <https://media.neliti.com/media/publications/190138-ID-motivasi-pbb-membentuk-united-nation-mis.pdf>. Diakses pada 03 Januari 2018 pukul 14.19 WIB.
- DW (*Deutsche Welle*). *Gencatan Senjata di Darfur*. (2010). <http://www.dw.com/id/gencatan-senjata-di-darfur/a-5281293>. Diakses pada 08 Januari 2018 pukul 16.06 WIB.
- DW (*Deutsche Welle*). *Korban Tewas Konflik Darfur Bisa Mencapai 300.000 Orang*. (2008). <http://www.dw.com/id/korban-tewas-konflik-darfur-bisa-mencapai-300000-orang/a-3287551>. Diakses pada 09 Januari 2018 pukul 16.40 WIB.
- Folia, Rosa Longi. *Perubahan Kebijakan Luar Negeri Non Intervensi Cina Terhadap Konflik Sudan*. Skripsi UNAIR, Surabaya: Universitas Airlangga, (2012). <http://repository.unair.ac.id/15453/1/gdlhub-gdl-s1-2012-foliarosal-20778-fis.hi.3-p.pdf>. Diakses pada 07 Januari 2018 pukul 09.05 WIB.

- Hardi, Rendi. *BAB II Tinjauan Pustaka*, Bandung: Universitas Komputer Indonesia. <http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/455/jbptunikompp-gdl-rendihardi-22710-8-i-bab-i.pdf>. Diakses pada 09 Januari 2018 pukul 10.34 WIB.
- Herdiyanti, Dita. *Peranan UNOCI (United Nations Operation In Cote D'Ivoire) Dalam Penyelesaian Konflik Pasca Pemilu 2010 Di Pantai Gading*. Skripsi UNHAS, Makassar: Universitas Hasanuddin, (2013). <https://core.ac.uk/download/pdf/25489411.pdf>. Diakses pada 09 Januari 2018 pukul 11.06 WIB.
- Human Right Watch. *Darfur 2007: Chaos Design Peacekeeping Challenges AMIS and UNAMID*. (2007). <https://www.hrw.org/report/2007/09/19/darfur-2007-chaos-design/peacekeeping-challenges-amis-and-unamid#page>. Diakses pada 06 Januari 2018 pukul 20.46 WIB.
- Leech, Noyes E, et al. *The International Legal System, Cases and Materials*, New York: Foundation Press. (1973). Dilihat dalam Herdiyanti, Dita. *Peranan UNOCI (United Nations Operation In Cote D'Ivoire) Dalam Penyelesaian Konflik Pasca Pemilu 2010 Di Pantai Gading*. Skripsi UNHAS, Makassar: Universitas Hasanuddin, (2013). <https://core.ac.uk/download/pdf/25489411.pdf>. Diakses pada 09 Januari 2018 pukul 11.06 WIB.
- Milles, M.B. dan Huberman, A.M. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, (1992). Dilihat dalam Pradita, Aji. *BAB III Metodologi Penelitian*. Skripsi UNY, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, (2013). <http://eprints.uny.ac.id/18100/5>. Diakses pada 07 Januari 2018 pukul 09.33 WIB.
- Nasution, Alfira. *Peran UNAMID Dalam Penyelesaian Konflik Darfur*. Skripsi UMY, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMY, (2012). <http://thesis.umi.ac.id/datapublik/t22355.pdf>. Diakses pada 06 Januari 2018 pukul 19.50 WIB.
- Neuman, W.L. *Social Research Method*. Boston: Allyn & Bacon, (2000). Dilihat dalam Folia, Rosa Longi. *Perubahan Kebijakan Luar Negeri Non Intervensi Cina Terhadap Konflik Sudan*. Skripsi UNAIR, Surabaya: Universitas Airlangga, (2012). <http://repository.unair.ac.id/15453/1/gdlhub-gdl-s1-2012-folearosal-20778-fis.hi.3-p.pdf>. Diakses pada 06 Januari 2018 pukul 09.05 WIB.
- Patnistik, Egidius. *Kondisi Korban Penculikan Memprihatinkan*. (2010). <http://internasional.kompas.com/read/2010/07/28/10483151/Kondisi.Korban.Penculikan.Memprihatinkan>. Diakses pada 09 Januari 2018 pukul 13.23 WIB.
- _____. *Sudan dan Pemberontak Darfur Berdamai*. (2011). <http://nasional.kompas.com/read/2011/07/15/10541242/sudan.dan.pemberontak.darfur.berdamai>. Diakses pada 08 Januari 2018 pukul 16.45 WIB.
- Perwita, Anak Agung Banyu, et al. *Kajian Konflik dan Perdamaian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, (2015).

- Perwita, Anak Agung Banyu dan Yani, Yanyan Mochamad. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Bandung: Remaja Rosdakarya, (2005). Dilihat dalam Hardi, Rendi. *BAB II Tinjauan Pustaka*, Bandung: Universitas Komputer Indonesia. <http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/455/jbptunikompp-gdl-rendihardi-22710-8-i-bab-i.pdf>. Diakses pada 09 Januari 2018 pukul 10.34 WIB.
- Pradita, Aji. *BAB III Metodologi Penelitian*. Skripsi UNY, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, (2013). <http://eprints.uny.ac.id/18100/5>. Diakses pada 07 Januari 2018 pukul 09.33 WIB.
- Pratama, Gita Arja. *Peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan African Union (AU) Dalam Menyelesaikan Konflik Bersenjata Non-Internasional di Darfur-Sudan*. Skripsi Universitas Lampung, Lampung: Fakultas Hukum, (2010). <http://digilib.unila.ac.id/19360>. Diakses pada 03 Januari 2018 pukul 12.53 WIB.
- Prinsloo, B. Louwrens. *Chapter 6: The African Union-United Nations Mission In Darfur (UNAMID)*. Thesis, Potchefstroom: North-West University, (2012). http://dspace.nwu.ac.za/bitstream/handle/10394/11076/Prinsloo_BL_Chapter_6.pdf?sequence=7. Diakses pada 09 Januari 2018 pukul 16.28 WIB.
- Rahman, M. Radhina. *Peran PBB Dalam Menanggulang Permasalahan HAM Terkait Konflik Bersenjata LRA (LORD'S RESISTANCE ARMY) di Uganda*. Jurnal Online Mahasiswa Fisip Vol. 1, No. 2, (2014). <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/3119/3020>. Diakses pada 09 Januari 2018 pukul 11.28 WIB.
- UNAMID. *UNAMID and Mine Action Team Detonate Unexploded Ordinance*. (2008). <https://unamid.unmissions.org/unamid-and-mine-action-team-detonate-unexploded-ordinance>. Diakses pada 08 Januari 2018 pukul 12.54 WIB.
- UNAMID. *UNAMID Condemns Attack on One of Its Patrols*. (2009). <https://unamid.unmissions.org/unamid-condemns-attack-one-its-patrols>. Diakses pada 08 Januari 2018 pukul 14.33 WIB.
- United Nations Security Council. *Resolution 1769*. (2007). [http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1769\(2007\)](http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1769(2007)). Diakses pada 07 Januari 2018 pukul 12.55 WIB.
- United Nations. *Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice*. (1945). <https://treaties.un.org/doc/publication/ctc/uncharter.pdf>. Diakses pada 09 Januari 2018 pukul 12.31 WIB.
- Wibisono, Kunto. *2 Prajurit Mesir Tewas Dalam Serangan di Darfur*. (2010). <https://www.antaranews.com/berita/185968/2-prajurit-mesir-tewas-dalam-serangan-di-darfur>. Diakses pada 08 Januari 2018 pukul 14.55 WIB.

BIOGRAPHY

1. **Hardi Alunaza SD**

Lecture from Department of International Relations Universitas Tanjungpura Pontianak West Kalimantan. He completed bachelor degree from International Universitas Muhammadiyah Malang and graduated from the postgraduate program in Politics and International Relations in Public Diplomacy Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Active as a member of Associate Researchers with Zaman University Cambodia and International Islamic University Malaysia. In 2015 he was invited to join Mahathir Global Peace School from Perdana Global Peace Foundation Kuala Lumpur. In 2016 was chosen as the delegation from Indonesia to International Conference on Arts, Humanities, and Social Sciences in Cambodia. He published some articles on Unpad Intermestic Journal, Social and Political Journal Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Atma Jaya Yogyakarta Communication Journal, Undip Indonesian Perspective Journal, Unifa Kosmopolitan Journal, Universitas Indonesia Communication Journal, Unida Gontor, and the Asia Pacific Studies from UKI Jakarta. He research interests are on Border and ASEAN Studies, Peace and Conflict Resolution, Public Diplomacy, International Politics, and Tourism Studies. On October 2016 he was invited to World Culture Forum Program in Bali.

2. **Bastian Andhony Toy**

Currently active as an International Relations Student from Department of International Relations Social and Political Sciences Universitas Tanjungpura. He research interests are on Peace and Conflict Resolution, International Tourism, Comparative Politics, and Foreign Policy. In April 2018 he was joined International Conference on Quds and Palestine Sovereignty at Unida Gontor and published a paper Global Response on Palestine Conflict Resolution. Besides academia, he also active as a member of Komahi and as a lecture assistant on foreign policy subject.